

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta adalah salah satu wilayah kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di antara empat kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Bantul, kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo. Luas wilayah DIY adalah sekitar 32, 5 km². Luas wilayah Kota Yogyakarta hanyalah sekitar 1, 025 % dari luas wilayah provinsi DIY. Letak geografis kota Yogyakarta diantara 110°24'19" BB sampai 110°28'53" BT dan 7°49'26" LS sampai 7°15'24" LS dengan ketinggian rata-rata 114 m di atas permukaan laut. Jarak terjauh dari Utara ke selatan kurang lebih 7,5 km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 km. Dengan kedudukan tersebut, secara umum Kota Yogyakarta memiliki posisi strategis yaitu sebagai Ibukota provinsi dan pusat kegiatan regional yang mencakup kawasan DIY dan Jawa bagian selatan. Posisi ini membentuk pola aktivitas, potensi dan permasalahan yang khas sebagai wilayah yang bersifat terbuka dengan mobilitas yang tinggi. Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dengan 45 kelurahan.

Kota Yogyakarta memiliki letak geografis dengan batasan wilayah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Sleman

Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul

Selatan : Kabupaten Bantul

Barat : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Batas tersebut menandakan bahwa Kota Yogyakarta sangat strategis sebagai pusat kota di Provinsi DIY karena terletak persis di tengah-tengah Provinsi DIY. Tidak heran tingkat keramaian dari aktivitas masyarakat sangatlah tinggi. Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk sebanyak 430.735 jiwa berdasarkan sensus penduduk 2011. Maka kepadatan penduduk Kota Yogyakarta dapat dihitung $430.735 \text{ jiwa} : 32,5 \text{ km}^2 = 13.253,38 \text{ jiwa/km}^2$. Artinya setiap 1 km^2 terdapat sekitar 13.253 jiwa, belum ditambah dengan warga asing yang sedang berkunjung ke Kota Yogyakarta untuk berwisata maupun menempuh pendidikan. Hal tersebut akan menambah semakin padatnya Kota Yogyakarta dengan berbagai aktivitas yang ada. (www.jogjakota.go.id)

2. Kondisi Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta Tahun 2013

Dari kelima kabupaten di DIY, Kota Yogyakarta dapat dikatakan memiliki kegiatan perekonomian yang lebih besar diantara empat kabupaten lainnya. Hal ini dikarenakan lokasi wilayahnya yang mudah dijangkau, terdapat banyak potensi wisata dan banyaknya perguruan tinggi yang ada. Salah satu bentuk kegiatan perekonomian di Kota Yogyakarta adalah dengan adanya kegiatan jual beli barang-barang kebutuhan sehari-hari baik di pasar tradisional, warung-warung tradisional atau toko

kelontong, serta di pusat perbelanjaan berbentuk toko modern seperti minimarket, atau supermarket. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, saat ini terdapat 33 pasar tradisional dan 54 minimarket waralaba di Kota Yogyakarta dimana 52 minimarket waralaba tersebut sesuai dalam ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 79 tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket.

Jumlah toko modern di Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sejak tahun 2009 (Disperindagkoptan, 2013). Beberapa *brand* waralaba minimarket yang peneliti temukan dalam penelitian ini didominasi oleh Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama, Alfamart milik PT. Sumber Alfaria Jaya dan Circle K milik PT. Circle K Indonesia Utama. Dua *brand* minimarket yaitu Indomaret dan Alfamart merupakan bentuk minimarket sedangkan Circle K sebenarnya lebih berbentuk *convenience store* karena tidak menjual sembako, namun karena ciri-ciri lain seperti luas bangunan sama dengan minimarket maka peneliti memasukkan dalam penelitian ini. Adapun total keseluruhan minimarket tersebut terdiri dari Indomaret sebanyak 37 unit, Alfamart sebanyak 8 unit dan Circle K sebanyak 9 unit.

Dari pengamatan yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa minimarket waralaba yang jaraknya kurang dari 400 m dari pasar tradisional, salah satunya Indomaret yang terletak di Jalan Parangtritis (dekat dengan Pasar Prawirotaman). Sedangkan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara disebutkan ada 54 minimarket (sesuai data dari Dinas

Perizinan), setelah peneliti melakukan pengamatan ternyata 1 minimarket Indomaret di Jalan Golo 26, Kecamatan Umbulharjo tidak ada (tetapi yang benar ada di Jalan Mentri Supeno 80), tetapi ada 1 Alfamart di Jalan Timoho milik CV. Hudson Media Utama yang belum tercantum dalam data Dinas Perizinan yang peneliti dapatkan. Kemudian peneliti juga mendapatkan data yang didapat melalui observasi bahwa banyak kesalahan dalam penulisan alamat letak minimarket tersebut berada. Ditemukan juga beberapa nomor alamat yang tidak sesuai antara data dengan di lapangan, serta terdapat 1 minimarket yaitu Alfamart yang terletak di Jalan Imogiri 210 yang sebenarnya ruas jalan tersebut tidak diperbolehkan dalam Perwal No. 79 tahun 2010, serta terdapat 1 minimarket menyerupai waralaba yaitu yang ada di kompleks Stasiun Tugu (menyerupai Indomaret).

3. Regulasi Penataan Waralaba Minimarket

Menjamurnya minimarket waralaba maupun toko modern lainnya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan beberapa regulasi guna mengatur keberadaan toko-toko tersebut, agar keberadaanya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara. Regulasi tersebut dibagi menjadi regulasi tingkat nasional dan tingkat daerah.

a. Regulasi tingkat nasional

Dimulai dengan Peraturan Presiden RI No. 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Regulasi ini mengatur penataan dan pembinaan pasar

tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern seperti lokasi, bangunan dan jam operasional, pemasokan barang, perizinan, pembinaan dan pengawasan serta sanksi agar pasar dan toko tradisional dapat terus tumbuh dan tercipta persaingan yang tertib. Pemerintah daerah dihimbau agar mengembangkan pasar tradisional dengan cara mengupayakan alternatif seperti pendanaan, peningkatan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional, memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang tradisional, serta memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina pasar tradisional.

Selanjutnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, peraturan ini mengatur berbagai persyaratan mengenai tata cara pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana yang diamanahkan pada pasal 14 Peraturan Presiden RI No. 112 tahun 2007. Dalam permendag tersebut juga menyebutkan lokasi untuk pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dimana minimarket termasuk ke dalam jenis toko modern yang wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah kabupaten/Kota tidak diperbolehkan memberi izin lokasi untuk pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

b. Regulasi tingkat daerah

Setelah berlakunya UU No. 32 tahun 2004, dalam rangka otonomi daerah dan pengawasan represif maka setiap daerah diberikan hak untuk mengatur urusan rumah tangganya masing-masing namun tidak bertentangan dengan pusat, seperti tujuan pengawasan repersif dimana setiap daerah yang membuat perda yang sudah diundangkan dalam lembaran daerah dalam waktu paling lambat tujuh hari harus sudah disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dinilai apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan kepentingan umum.

Semakin banyak jumlah minimarket waralaba mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tidak tinggal diam. Berbagai kebijakan telah dilakukan salah satunya ditingkat provinsi yaitu dikeluarkannya Perda DIY No. 8 tahun 2011 tentang pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern. Peraturan ini menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional dan pelaku usaha yang ada di dalamnya. Perlindungan yang dimaksud adalah untuk penentuan lokasi yang menguntungkan pasar tradisional, kejelasan dan kepastian hukum hak pakai lahan pasar dan pengaturan mengenai mekanisme pelayanan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Sedangkan untuk tingkat kota, perda yang mengatur hal serupa belum ada tetapi pemerintah kota Yogyakarta tengah berupaya dengan

mengeluarkan Peraturan walikota No. 79 tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi keberadaan warung maupun pasar tradisional, toko kelontong serta UMKM yang telah ada sejak dulu yang merupakan salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota sebenarnya tidak melarang pendirian minimarket di wilayah Kota Yogyakarta tetapi lebih berupaya untuk membatasi keberadaannya.

4. Kebijakan Pembatasan Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota No. 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket merupakan salah satu bentuk kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menata keberadaan usaha waralaba minimarket. Tujuan utama dari pembatasan usaha waralaba minimarket adalah dalam rangka melindungi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta. Kebijakan penataan usaha waralaba minimarket salah satunya adalah dengan cara membatasi jumlah minimarket berjejaring yang ada di kota Yogyakarta sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 79 tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta. Peraturan ini merupakan salah satu bentuk regulasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penataan usaha waralaba minimarket. Implementor kebijakan tersebut melibatkan beberapa dinas terkait, yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan),

Dinas Perizinan (Dinzin) dan Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta melalui pengawasan dari DPRD Kota Yogyakarta.

Tujuan pemerintah Kota Yogyakarta membatasi jumlah usaha waralaba di Kota Yogyakarta yaitu:

- a. Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah daerah;
- b. Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan tidak sehat seperti bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan UMKM
- c. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan UMKM
- d. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
- e. Meningkatkan peran UMKM dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.

Pembatasan usaha waralaba minimarket yang dituangkan dalam Perwal No. 79 Tahun 2010 mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Usaha waralaba minimarket sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berjarak paling dekat 400 meter dari pasar tradisional;

- 2) Usaha waralaba minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya diperbolehkan di jalan-jalan kolektor yaitu hanya jalan-jalan tertentu yang telah ditetapkan sesuai dalam perwal tersebut;
- 3) Jumlah usaha waralaba minimarket sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 di setiap kecamatan dibatasi. Dari 14 kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta maksimal berjumlah 52 minimarket.

Jumlah waralaba minimarket yang diperbolehkan di setiap kecamatan yang dan ruas jalan yang telah ditentukan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Waralaba Minimarket Tiap Kecamatan:

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Tegalrejo	4
2.	Danurejan	3
3.	Jetis	3
4.	Gedong Tengen	3
5.	Gondokusuman	8
6.	Pakualaman	2
7.	Gondomanan	2
8.	Kraton	0
9.	Wirobrajan	3
10.	Mantrijeron	3
11.	Mergangsan	6
12.	Ngampilan	3
13.	Umbulharjo	9
14.	Kotagede	3
Jumlah		52

Sumber : Perwal Yogyakarta No. 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimerket di Kota Yogyakarta

Tabel tersebut menunjukkan jumlah minimarket waralaba yang boleh didirikan di 14 kecamatan yang terdapat di Kota Yogyakarta dan disetiap kecamatan memiliki unit minimarket waralaba yang berbeda-beda. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan kelebihan unit minimarket waralaba di beberapa kecamatan, yaitu :1) Kecamatan Jetis terdapat 4 unit, sedangkan kuota maksimal adalah 3 unit; 2) Kecamatan Gondokusuman terdapat 9 unit, sedangkan kuota maksimal adalah 8 unit ; 3) Kecamatan Ngampilan terdapat 4 unit, sedangkan kuota maksimal adalah 3 unit; 4) Kecamatan Tegalrejo terdapat 3 unit, sedangkan kuota masimal adalah 4 unit. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah waralaba minimarket di Kota Yogyakarta terdapat 54 unit, yang berarti melebihi jumlah kuota yang diperbolehkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 79 tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket yaitu sebanyak 52 minimarket.

Setiap kecamatan di Kota Yogyakarta, hanya terdapat beberapa ruas jalan yang diperbolehkan untuk pendirian waralaba minimarket. Ruas jalan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Ruas Jalan untuk Pendirian Waralaba Minimarket:

No.	Nama Jalan	No.	Nama Jalan
1.	Jalan Abu Bakar Ali	22.	Jalan Ngeksigondo
2.	Jalan Adi Sucipto	23.	Jalan Parangtritis
3.	Jalan AM Sangaji	24.	Jalan Perintis
4.	Jalan Bantul		Kemerdekaan
5.	Jalan Bhayangkara	25.	Jalan Piere Tendean
6.	Jalan Brigjen Katamso	26.	Jalan Pramuka
7.	Jalan Dr. Sutomo	27.	Jalan RE Martadinata
8.	Jalan Gajah Mada	28.	Jalan Suryopranoto
9.	Jalan Gayam	29.	Jalan Tamansiswa
10.	Jalan Gadekan Lor	30.	Jalan Urip Sumoharjo
11.	Jalan Gedong Kuning	31.	Jalan Veteran
12.	Jalan HOS Cokroaminoto	32.	Jalan Jend. Sudirman
13.	Jalan Ipda Tut Harsono/Timoho	33.	Jalan Prof. Yohanes
14.	Jalan KH Ahmad Dahlan	34.	Jalan Hayamwuruk
15.	Jalan KH Wakhid Hasyim	35.	Jalan P. Mangkubumi
16.	Jalan Kusumanegara	36.	Jalan DI. Panjaitan
17.	Jalan Kyai Mojo	37.	Jalan Sisingamangaraja
18.	Jalan Magelang	38.	Jalan Sorogenen
19.	Jalan Malioboro	39.	Jalan Tegalturi
20.	Jalan Mataram	40.	Jalan Glagahsari
21.	Jalan Menteri Supeno	41.	Jalan Dagen

Sumber : Perwal Yogyakarta No. 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket

Dari hasil pengamatan di lapangan, peneliti menemukan terdapat dua ruas jalan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam data dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, yaitu: minimarket di Jalan Golo 26 dan di Jalan Imogiri 210, dimana jalan tersebut tidak termasuk dalam ruas jalan yang diperbolehkan untuk pendirian waralaba minimarket di Kota Yogyakarta.

Daftar nama dan lokasi pendirian waralaba minimarket dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. Nama dan lokasi waralaba minimarket di Kota Yogyakarta:

No	Kecamatan	Nama Pemohon	Lokasi	Pasar Terdekat
1.	TegalRejo	1.PT.Indomarco Prismaatama	Jl.Magelang 105	Pasar Karang-Waru
		2.PT.Indomarco Prismaatama	Jl.HOSCokroaminoto 98	
		3.PT.Indomarco Prismaatama	Jl. Kyai Mojo 88	
2.	Danurejan	1. Indomarco	Jl.Dr.Sutomo 21	Pasar Lempu-Yangan
		2.PT.Sumber Alfaria Trijaya	Jl.HayamWuruk 74	
		3. Andreas Winarto	Jl. Hayam Wuruk 16	
3.	Jetis	1.CircleK (Dwi Mutiara Manunggal)	Jl. Sudirman 14	Pasar Kranggan dan Pasar pingit
		2.Alfamart (Randi Riantoro)	Jl. AM Sangaji 59	
		3.Indomarco Prismaatama	Jl.Magelang 28 A	
		4. PT. Circle K Indonesia Utama	Jl. AM Sangaji 59	
4.	Gedong-Tengen	1. Indomarco	Jl. Malioboro 179	Pasar Kembang
		2. Indomarco	Jl.P. Mangkubumi 17	
		3. Indomarco Prismaatama	Jl. Malioboro 145	
5.	Pakualaman	1. Indomarco	Jl. Gajah Mada 64	Pasar Sentul
		2. Indomarco	Jl. Gajah Mada 15	
6.	Gondo-Manan	1. Indomarco	Jl.Brigjen Katamso 97 A	Pasar Pathuk, Pasar Beringharjo
		2. Indomarco	Jl.Bhayangkara 50	
7.	Kraton	-	-	-
8.	Gondokusuman	1. Indomarco	Jl. Timoho 111	-
		2. Indomarco	Jl. Gayam 81	
		3. Indomarco	Jl.Herman Yohanes RT 36	
		4. Indomarco	Jl.Laksda Adisucipto 75	
		5. Circle K	Jl.Urip Sumoharjo 139	
		6. Circle K	Jl.Jendral Sudirman 40	
		7.Circle K	Jl. Timoho 29 b	
		8. Circle K	Jl. Abu Bakar Ali 24	
9.	Wirobrajan	1. Indomarco	Jl.HOS Cokroaminoto 91	Pasar Serangan
		2. Indomarco	Jl.Kapten Tendean 36	
		3. Indomarco	Jl.RE. Martadinata 116	
10.	Mantrijeron	1. Indomarco	Jl. Bantul RT 59 RW 12	Pasar

		2. Indomarco	Jl. Letjen DI. Panjaitan 101	Gading dan Pasar Prawiro Taman
		3. Circle K	Jl. Parangtritis 98	
		4. Ida Rufaida	Jl.Letjen DI. Panjaitan 49a	
11.	Mergang-San	1. Indomarco	Jl.Sisingamangaraja 50	Pasar Prawiro Taman
		2. Indomarco	Jl.Parangtritis 107	
		3. Indomarco	Jl. Taman Siswa 85	
		4. PT. Sumber Alfaria Trijaya	Jl. Parangtritis 29	
		5. PT. sumber Alfaria Trijaya	Jl.Sisingamangaraja 80	
		6. PT. Circle K Indonesia Utama	Jl. Taman siswa 136	
12.	Ngampilan	1. Indomarco	Jl. Bhayangkara 71	Pasar Senen
		2. Indomarco	Jl. KH. Ahmad Dahlan 76	
		3. Alfa	Jl. KH. Wakhid Hasyim 43	
		4. Indomarco	Jl.KH.Wakhid Hasyim 55b	
13.	Umbul-harjo	1. Indomarco	Jl. Glagahsari 98	Pasar Pace, Pasar Giwangan, Pasar Gedong kuning
		2. Indomarco	Jl. Sorogenen Rt 15 Rw 13	
		3. Indomarco	Jl. Golo 26	
		4. Indomarco	Jl. Kusumanegara 24	
		5. Indomarco	Jl. Pramuka 111	
		6.CV. Yulingkar Darma Kinasti	Jl. Glagahsari 111	
		7.Alfamart (CV. Karya Indah)	Jl. Imogiri 210	
		8. Circle K (Dwi Mutiara Manunggal)	Jl. Kusumanegara 46	
		9. Indomarco	Jl.Menteri Supeno	
14.	Kota-gede	1. Indomarco	Jl. Gedongkuning 5	Pasar Gedong kuning dan Pasar Kota Gede
		2. Alfa	Jl. Gedongkuning 60	
		3. Indomarco	Jl. Ngeksigondo	

Sumber : Data Dinas Perizinan Kota Yogyakarta (2013)

Dari tabel tersebut dapat dilihat ketidaksesuaian antara data dari Dinas Perizinan dengan fakta di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat pada Kecamatan Umbulharjo, yaitu terdapat dua minimarket waralaba yaitu Indomaret di Jl. Golo 26, sedangkan di lapangan terletak di Jl. Menti Supeno 80 dan Alfamart di Jl. Imogiri 210, sedangkan di lapangan minimarket tersebut tidak ada.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 79 tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket, prosedur dalam mengurus perizinan pendirian minimarket berjejaring di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a) Diawali dengan izin IMB, SPPL, mengambil formulir permohonan izin usaha waralaba minimarket, serta meminta izin dari tetangga (samping kanan-kiri, depan-belakang) dari lokasi yang akan didirikan minimarket. Jika tetangga langsung berhimpitan dengan jalan lebih dari 2,5 m maka tidak perlu meminta izin tetangga, tetapi jika jalan kecil kurang dari 2,5 m maka wajib minta persetujuan tetangga depan yang ada di seberang jalan. Kemudian meminta persetujuan dari RT, RW dan Lurah setempat. Dilengkapi persyaratan-persyaratan seperti gambar-gambar denah IMB. Untuk mengurus HO atau izin gangguan syaratnya adalah IMB tersebut.
- b) Kemudian syarat tersebut dikembalikan ke Dinas Perizinan, lalu di cek terkait persyaratan administrasinya dan cek lapangan serta kondisi tempat yang akan digunakan. Jika dari administrasi dan teknis

memenuhi syarat maka baru bisa diproses perizinannya lalu diterbitkan surat izin usaha minimarket waralabanya.

- c) Jika izin sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Perizinan dan diterbitkan, maka akan ada pemberitahuan lewat surat/telfon, setelah pemohon datang untuk melakukan pembayaran retribusi pendirian usaha waralaba tersebut, kemudian membawa bukti pembayaran ke loket VI di kantor dinas perizinan kota Yogyakarta, kemudian akan diberi kuisioner terkait IKM, setelah diisi maka pemohon bisa diberikan izin pendiriannya.

B. Pembahasan

1. Arah Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penataan Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta

Arah kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penataan waralaba minimarket dapat dilihat dari kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan Peraturan Walikota No. 79 tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket. Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dalam Penataan Waralaba Minimarket dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengolahan dari wawancara peneliti dengan keempat narasumber terkait upaya mengatasi perkembangan minimarket jejaring didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Komisi A DPRD Kota Yogyakarta

Komisi A DPRD Kota Yogyakarta mempunyai tugas mengawasi kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta termasuk dalam hal perizinan, BKD, kepegawaian, ketertiban, hukum dan sebagainya yang berkaitan dengan pemerintahan. Selain mengawasi secara langsung perkembangan minimarket waralaba di Kota Yogyakarta, DPRD juga terbantu oleh laporan dari masyarakat, karena hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama bukan saja menjadi tanggung jawab dewan, meskipun kapasitasnya lebih banyak ke dewan sebagai pengawas.

DPRD Kota Yogyakarta juga mendapat banyak masukan dari masyarakat sehingga DPRD bisa melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke beberapa minimarket jejaring yang menjadi laporan masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran, termasuk mengundang pihak dari Dinas Perizinan dan Dinas Ketertiban karena kaitannya dengan pelanggarannya, kemudian dalam rapat kerja akan disampaikan mana minimarket jejaring yang berizin dan mana yang tidak kemudian DPRD menanyakan ke Dinas Perizinan apakah berizin atau tidak, jika mempunyai izin maka akan menjadi kewenangan dinzin untuk memberikan peringatan, sedangkan jika tidak berizin akan menjadi kewenangan Dinas Ketertiban, itulah yang menjadi target DPRD Kota Yogyakarta, karena sesuai Perwal No. 79 tahun 2010 sudah jelas kuota maksimal minimareket jejaring di kota Yogyakarta adalah 52 minimarket. DPRD Kota Yogyakarta juga

melakukan peningkatan pengawasan dengan cara selalu mengadakan rapat kerja (raker) internal (dengan anggota dewan) atau dengan eksekutif (bersama Walikota) termasuk kunjungan lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan komisi A, terkait koordinasi dengan Pemkot Komisi A menyebutkan bahwa masih kurang koordinasi antara Dinas Perizinan dengan Dinas Ketertiban, khususnya dalam menangani kasus masih berdirinya minimarket di Stasiun Tugu. Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Chang selaku ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, bahwa:

”...saya kira dinzin sudah cukup bagus kinerjanya, karena kalau di lapangan kan yang lebih tahu dinzin, tapi kurang koordinasi dengan dintib, apalagi di era sekarang dengan peralatan yang canggih seharusnya kan dintib bisa buka web, kewajiban dinzin juga mengisi web, ketertiban juga buka web...”

Komisi A juga menyayangkan kalau dalam pembuatan peraturan walikota ini tidak ada koordinasi dengan legislatif, meskipun yang menentukan adalah eksekutif, bahkan kadang muncul peraturan walikota baru tapi legislatif pun tidak tahu.

b. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Pelaksanaan perizinan di Dinas Perizinan dilaksanakan oleh bidang regulasi dan pengembangan. Bidang tersebut mempunyai tugas yaitu menyusun, mengkaji dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perizinan serta pengembangan kinerja Dinas Perizinan. Bidang tersebut mempunyai dua seksi, yaitu:

1) Sie. Regulasi yang bertugas mencermati, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan pusat maupun daerah; 2) Sie. Pengembangan Kinerja yang bertugas melakukan pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), melakukan ISO (Izin Sistem Operasional); dan membuat tata mekanisme proses perizinan yang sederhana dan menentukan perubahan syarat-syaratnya termasuk pengembangan sumber daya manusia, sarana prasarana dan semuanya namun sekedar usulan/kajian sedangkan aplikasinya ada di masing-masing sekretariat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gatot, mengatakan bahwa Dinas Perizinan tidak bisa menolak perkembangan toko kebutuhan sehari-hari dan tidak berjejaring, misal toko Pamela yang ada di Yogyakarta, karena jumlah tokonya banyak, tapi bukan waralaba, namun hanya toko induk saja dan cabangnya, dimana pemiliknya tetap satu orang, yang tidak boleh adalah penambahan waralaba dengan konsorsium besar. Dikatakan beliau bahwa setelah izin usaha habis maka Pemerintah Kota tidak memberikan lagi perpanjangan izin, mereka harus pindah dan lokasi yang baru harus lebih dari 400 meter dari pasar tradisional. Beliau juga mengatakan kalau masalah pelanggaran, pihak Dinas Perizinan tidak tahu, dalam Perwal No. 79 tahun 2010 terdapat kuota 52 unit minimarket waralaba di setiap kecamatan, kalau sudah terpenuhi maka Dinas Perizinan

tidak akan memproses, sedangkan yang menindaklanjuti adalah Dinas Ketertibn.

Pendirian dimulai dari IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan dilihat untuk apa usahanya, kalau untuk minimarket waralaba tidak bisa diproses, tapi kalau minimarket umum bukan waralaba bisa diproses. Dari IMB itu juga dapat dilihat mana yang termasuk waralaba dan mana yang bukan, jika minimarket tersebut waralaba, maka harus memenuhi syarat waralaba yaitu terdapat hak kekayaan intelektual (HAKI), minimal beroperasi selama 5 tahun, memberi keuntungan masyarakat, mempunyai ciri khas tertentu dan didaftarkan di Kementrian Perdagangan.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Bapak Gatot, terdapat upaya pemerintah dalam mengatasi minimarket yang tidak menaati peraturan dan melebihi kuota dari 52 unit, yaitu dengan cara:

- 1) Penegakan dan penertiban dari Dinas Ketertiban dari fungsi penegakan
- 2) Adanya usaha yang fiktif dalam mengurus perizinan, yang sebenarnya bukan izin untuk usaha waralaba minimarket tetapi sebagai usaha waralaba minimarket. Perlu adanya penegakan atas izin-izin yang sudah diterbitkan oleh Dinas Perizinan. Sehingga dalam Dinas Perizinan ada bidang pengawasan dan pengaduan yang berfungsi untuk mengawasi adanya izin yang diberikan sesuai atau tidak. Diharapkan tidak adanya penyelewengan

maupun penyelenggaraan dalam menggunakan izin dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Salah satu contohnya pernah dilakukannya pencabutan izin yang diberikan dengan usaha minimarket yang dijalankan di Jalan H.O.S Cokroaminoto.

Sanksi yang diberikan bagi usaha-usaha waralaba dan toko modern yang telah melanggar izin yaitu:

- a) Sanksi administratif, jika toko modern sudah mengantongi izin operasional, maka izin operasional tersebut langsung dicabut. Sedangkan bila tidak ada izin sama sekali maka toko modern tersebut akan langsung ditutup.
- b) Sanksi pidana, lewat sidang yang diajukan PPNS(Penyidik Pegawai Negri Sipil) sebagai unit pelaksana pengawasan toko modern di Dinas Ketertiban melalui sidak (inspeksi mendadak).

Jika toko modern terbukti melakukan pelanggaran, misalnya karena tidak memiliki izin, maka pemilik toko modern akan langsung diundang ke Dinas Ketertiban kemudian dilakukan penyidikan. Setelah itu baru dapat diajukan ke pengadilan. Selama ini hasil putusan pengadilan sebagai sanksi bagi pemilik toko modern pada umumnya berupa sanksi denda, sedangkan hukuman penjara masih jarang terjadi kecuali bila terbukti berkali-kali telah melakukan pelanggaran.

Secara umum pemberian kesempatan untuk berusaha secara merata baik bagi masyarakat lokal maupun pemilik usaha jejaring jika

pendirian tidak dibolehkan dan tidak diberikan izin oleh masyarakat sekitar yang menjadi tetangga usaha jejaring tersebut karena masalah personal, seperti akan mengurangi omset penjualan atau ketidaksukaan karena takut tersaingi, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah bagi terbitnya izin usaha waralaba jejaring. Namun izin terkait pendirian usaha dapat ditolak apabila ada anggapan teknis lingkungan, artinya bukan hanya penolakan dari satu orang yang tidak suka, akan tetapi lebih ke ketentraman lingkungan yaitu bagi kepentingan orang banyak.

c. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

Salah satu yang hal yang dapat dilihat sebagai suatu hal yang sangat penting dalam perizinan adalah mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran perizinan. Untuk mengadakan penegakan hukum, Dinas Perizinan tidak diberikan kewenangan. Hal tersebut diserahkan kepada instansi lain, yaitu Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta bidang Ketentraman dan Ketertiban yang terdiri dari Seksi pengendalian Operasi dan seksi Pengamanan. Salah satu yang mereka tegakkan adalah perda bidang perizinan, dalam kaitannya tentang penataan waralaba minimarket adalah penegakkan terhadap pelanggaran izin gangguan (HO) dan izin mendirikan minimarket waralaba.

Dinas Ketertiban mempunyai 4 bidang yaitu bidang sekretariat, Polisi Pamong Praja (Pol PP), Pengendalian Operasional (Danlop) dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Pengembangan Kapasitas Usaha (P3U). Terdapat seksi penyidikan yang terdiri dari kepala seksi, dan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) yang bertugas menyidik PNS dan mengawal semua perda yang ada ketentuan pidananya misalnya izin gangguan (HO), kemudian terdapat seksi pengkajian dan pengembangan kapasitas yang bertugas menyidik usaha yang tidak berizin, sedangkan yang melakukan eksekusi, misalnya penutupan usaha minimarket waralaba yang melanggar aturan adalah bagian Pengendalian Operasional. Dinas Ketertiban bekerja melalui tiga sistem, yaitu secara regular, terpadu dan mandiri. Regular melalui struktur kerja masing-masing, terpadu yaitu secara bersama-sama misalnya PPNS dengan Danlop atau Dinas Ketertiban bekerja ketika mendapat laporan dari Dinas Perizinan dan secara mandiri.

Pihak Dinas Perizinan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum yang diberikan kepada pihak Dinas Perizinan adalah berkaitan dengan pencabutan izin. Hal tersebut dikarenakan bahwa pihak yang mengeluarkan keputusan memang mestinya tidak disertai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, agar penegakan hukum dapat berjalan secara lancar secara obyektif dan baik. Sementara untuk melakukan

pencabutan izin memang mesti diberikan kepada Dinas Perizinan untuk melakukannya, karena sesuai dengan asas *contarius actus* bahwa suatu keputusan yang lama dapat menjadi tidak berlaku lagi apabila telah dicabut oleh instansi yang mengeluarkannya. Terkait minimarket waralaba di Stasiun Tugu maka Dinas Ketertiban akan melakukan tindakan persuasive dan menertibkan pelanggaran karena tujuannya sama-sama meminimalisir pelanggaran, bukan tindakan represif seperti melakukan penutupan atau pembongkaran paksa.

d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta

Sedangkan pada Disperindagkoptan, sebenarnya tugas yang berkaitan dengan instansi tersebut adalah memonitoring terkait dengan barang-barang yang dijual pada minimarket waralaba (dari sisi perdagangan), barang-barang yang dijual jangan sampai kadaluwarsa, atau tidak layak jual. Terkait dengan adanya pelanggaran terhadap Perwal No. 79 tahun 2010,

Pada saat ada peraturan walikota tersebut dikeluarkan ternyata sudah banyak minimarket jejaring yang berdiri, sehingga tahun lalu (2012) ada perda inisiatif dari dewan yang kaitannya bukan pembatasan tetapi penataan pusat perbelanjaan dan toko modern termasuk waralaba minimarket, tetapi sampai sekarang memang belum dibahas lagi karena pada saat pembahasan terakhir akan ada

Peraturan Menteri Perdagangan yang baru kaitannya dengan pedoman penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Sehingga diharapkan kebijakan penataan waralaba minimarket yang akan dibahas tidak lagi seperti simalakama, dalam artian tetap bisa memberikan dampak yang baik bagi para pelaku usaha baik dari pihak pedagang tradisional, toko kelontong maupun untuk waralaba minimarket itu sendiri.

Dalam tugasnya, Disperindagkoptan tidak melakukan sosialisasi Perwal No. 79 tahun 2010 dengan pemilik usaha waralaba minimarket tetapi sosialisasi ke kecamatan, karena yang mempunyai wilayah (untuk kuota pendirian minimarket) adalah kecamatan namun sosialisasi pernah dilakukan oleh Provinsi, jadi ada kegiatan dari pusat dimana izin waralaba atau Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) pemberi waralaba ada di pusat, sedangkan untuk penerima waralaba izinnya ada di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Beberapa pengusaha sendiri masih bingung apakah usaha yang mereka buka itu termasuk waralaba atau hanya cabang seperti yang dikemukakan Ibu Nanik selaku Kabid Perdagangan Disperindagkoptan Kota Yogyakarta yang mengatakan bahwa:

“... pengusaha Mie Ayam Yudi pernah bertanya, beliau masih bingung padahal usahanya adalah cabang tapi seperti waralaba. Sehingga dari hal tersebut saya melihat kenapa data-data di dinzin minim sekali kaitannya dengan STPW. Soalnya usaha waralaba harus punya HAKI, sementara Mie Ayam Yudi belum punya jadi harus didaftarkan dulu kalau mau diwaralabakan, kemudian usahanya harus sudah punya keuntungan, punya ciri khas sendiri dimana itu semua izinnya

dari Kementrian Perdagangan, sedangkan penerimanya disesuaikan dengan daerah masing-masing”.

Dari pembahasan kinerja perangkat daerah di atas dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan penataan waralaba minimarket di Kota Yogyakarta adalah berupa eksekusi dari penindakan pelanggaran peraturan yang ada, jadi dalam hal ini yang lebih berperan adalah Dinas Ketertiban kota Yogyakarta. Sedangkan untuk penataan waralaba selanjutnya mengarah ke pematangan pembuatan Peraturan Daerah tentang Pasart Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, jadi peraturan selanjutnya tidak hanya memuat pembatasan waralaba minimarket saja, tetapi sudah memasuki lingkup penataan minimarket waralaba seperti batasan jumlah pasar modern yang beroperasi di Kota Yogyakarta dan pnyesuain minimarket waralaba dengan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat Kota Yogyakarta.

Jadi arah kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menata waralaba minimarket adalah melindungi para pedagang pasar tradisional, pedagang warung tradisional atau toko kelontong, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kota Yogyakarta.

2. Pengembangan Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penataan Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta

Pengembangan kebijakan dalam usaha menata waralaba minimarket dapat dilihat dari bentuk koordinasi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penataan Waralaba Minimarket. Bentuk koordinasi tersebut tergantung pada 3 dinas terkait yaitu Dinas Perizinan, Dinas Ketertiban dan Disperindagkoptan dan diawasi oleh DPRD Kota Yogyakarta. Dari masing-masing dinas tersebut saling berkoordinasi sesuai fungsi dan perannya masing-masing yaitu:

- a. Dinas Perizinan mempunyai fungsi penegakan atas izin yang diterbitkan
- b. Disperindagkoptan, mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasan usaha waralaba minimarket sesuai dengan bidang, tugas dan wewenangnya
- c. Dinas Ketertiban mempunyai fungsi pengawasan dan penegakan atas pelanggaran perwal tersebut.

Hubungan kerja antara Dinas Perizinan dengan Dinas Ketertiban yaitu jika terjadi suatu pelanggaran atas izin yang diterbitkan, misalnya izin yang diberikan sebelumnya toko kelontong biasa namun setelah berdiri menjadi waralaba, maka tugas Dinas Perizinan terutama berkaitan dengan kewajiban di bidang pengawasan dan pengajuan izin, maka akan melakukan cek lapangan, jika izin sama yang dikeluarkan, luasnya sama, izin gangguan ada tapi ternyata setelah dicek menjadi usaha yang tidak punya izin karena untuk jualan miras, lalu langkah pertama yang dilakukan Dinas Perizinan adalah memberikan surat peringatan (SP) sebanyak 3 kali, jadi kewenangan Dinas Perizinan sebatas menginformasikan ke Dinas

Ketertiban, jika setelah SP-3 tidak ada reaksi dari toko tersebut atau jika usaha tersebut tidak ditutup sampai batas terakhir waktu yang diberitakan maka izin yang Dinas perizinan berikan akan dicabut, dan kewenangan selanjutnya ada pada Dinas Ketertiban yaitu melakukan penertiban seperti penutupan usaha. Kemudian kaitannya dengan Disperindagkoptan adalah berkaitan dengan izin usaha. Izin usaha yang dibuat memerlukan kajian sosial ekonomi kemasyarakatan yang diberikan pengesahan dari Disperindagkoptan.

Jika dalam pengajuan suatu izin usaha persyaratan kajian sosial ekonomi kemasyarakatan belum mendapatkan pengesahan maka izin tidak akan diloloskan, kemudian fungsi pembinaan dari Disperindagkoptan yaitu bila terjadi pelanggaran maka akan dilakukan pembinaan. Pembinaan dalam hal ini lebih terkait dengan penjualan komoditas usaha yang berhubungan dengan harga, kualitas dan kuantitas barang agar tidak lebih murah daripada toko kelontong/warung tradisional. Namun bila usaha pembinaan tersebut tidak berhasil maka Disperindagkoptan mengirimkan surat laporan ke Dinas Perizinan tentang kegiatan usaha yang menyimpang dan ketika kegiatan itu belum mempunyai izin, maka akan dilakukan pembinaan untuk mengurus izin, kemudian koordinasi dengan Dinas Ketertiban untuk dilakukan penindakan bahkan sampai ke penutupan usaha.

Dari bentuk koordinasi tersebut dapat dilihat bahwa pengembangan kebijakan dalam menata waralaba minimarket akan dilakukan dalam

pembuatan peraturan daerah yang baru dan disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat Kota Yogyakarta.

Kebijakan penataan penataan waralab minimarket di Kota Yogyakarta menimbulkan berbagai dampak baik di bidang sosial maupun ekonomi. Dampak sosial ekonomi adanya kebijakan ini dapat dilihat dari tujuan kebijakan yaitu perlindungan UMKM. Secara substansif dampak bagi UMKM tidak ada, namun dari non UMKM, terutama investor merasa terbatas sehingga mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bisa berinvestasi di Kota Yogyakarta karena kuota telah terpenuhi. Kajian dampak keberadaan toko modern di Kota Yogyakarta tahun 2011 dari pusat studi ekonomi dan kebijakan publik (PSE-KP) UGM menyebutkan bahwa keberadaan minimarket memberikan dampak positif dan negatif pada usaha kelontong. Dampak positif yaitu pada toko kelontong bahwa mereka dapat memberikan hutang kepada pembeli, yang berarti adanya kedekatan sosial yang terjalin antara tetangga, dampak lain yaitu dapat melatih pedagang toko kelontong untuk melihat peluang pasar sehingga bisa belajar lebih moderat dengan keberadaan pasar yang semakin lama semakin berkembang.

Keberadaan toko modern juga dapat memberikan motivasi bagi pedagang kelontong dan toko tradisional untuk menjadi lebih baik, yaitu melalui perbaikan kualitas pelayanan dan manajemen keuangan dan barang-barang yang dijual. Sedangkan dampak negatif adalah intensitas konsumen yang turun akibat selera konsumen yang

berubah, selain itu kalah bersaing harga terutama pada barang-barang sembako melalui promosi yang dilakukan oleh toko modern yang lebih menarik masyarakat. Hal itu memiliki dampak lebih lanjut yaitu penurunan omset penjualan dari toko kelontong dan warung tradisional. Namun dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku bisnis perdagangan tradisional menganggap keberadaan toko modern lebih membawa dampak negatif bagi usaha mereka.

Dampak negatif juga dirasakan dari pihak pengusaha/investor yaitu mereka merasa hak-hak mereka untuk berusaha sudah dibatasi, sehingga mereka tidak mendapatkan hak untuk berinvestasi di Yogyakarta. Sedangkan dari pihak pedagang kelontong juga masih merasakan dampak negatif meskipun telah ada kebijakan Perwal No. 79 tahun 2010.

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan dinas terkait terdapat pula beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penataan waralaba minimarket, antara lain:

- 1) Keinginan masyarakat untuk mendirikan minimarket waralaba sangat tinggi. Keuntungan yang ditawarkan oleh usaha waralaba minimarket sangat besar karena penerima waralaba tinggal menyediakan dana sesuai perjanjian kemudian tinggal menjalankan usahanya. Hal inilah yang mendorong tingginya minat masyarakat untuk mendirikan minimarket waralaba. Sehingga di Kota Yogyakarta terdapat indikasi minimarket

waralaba ilegal karena tidak mengantongi izin dari Dinas Perizinan.

- 2) Dinas Perizinan tidak mempunyai wewenang yang kuat untuk mengatur secara lebih lanjut mengenai keberadaan usaha waralaba. Hal ini dikarenakan tugas Dinas Perizinan adalah memberikan izin jika pemohon usaha waralaba berniat mendirikan usaha tersebut, sedangkan untuk melakukan peneguran dan penertiban terhadap pelanggaran pendirian waralaba minimarket telah menjadi tugas Dinas Ketertiban.
- 3) Banyak masyarakat yang mengajukan izin mendirikan toko individual tapi kenyataannya yang berdiri adalah usaha waralaba minimarket. Dengan kata lain banyak upaya yang ditempuh oleh pengusaha untuk mendirikan toko waralaba misalnya dengan mengelabui proses perizinan.
- 4) Dari Dinas Ketertiban sebenarnya tidak ada kendala yang cukup besar, Dinas Ketertiban sudah bekerja sesuai prosedur, hanya saja kadang penilaian DPRD Kota Yogyakarta yang menilai kinerja Dinas Ketertiban lamban dan terkesan terburu-buru untuk menegur Dinas Ketertiban terutama dalam penindakan minimarket di Stasiun Tugu.

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat dilihat bahwa meskipun diberlakukan kebijakan pembatasan waralaba minimarket yaitu Peraturan Walikota No. 79 tahun 2010 namun

kekuatan hukumnya masih kurang kuat sehingga meskipun adanya petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari Dinas Ketertiban tetap belum bisa menegakkan peraturan walikota tersebut secara tegas karena kekuatan hukum peraturan walikota masih lemah. Sehingga perlu segera dibuat pengaturan yang massif melalui regulasi tingkat daerah yang disusun oleh dinas terkait yaitu peraturan daerah terkait penataan waralaba minimarket agar pelanggaran bisa diminimalisir.